



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERISAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejati Lidik Reses Dewan

- Peserta Terindikasi Digelembungkan
- Biaya Sewa Tidak Sesuai Sebenarnya

RESES anggota DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2017 lalu tengah diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Terindikasi terjadi pengelembungan jumlah peserta reses. Lalu biaya sewa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Persoalan reses



MARTHIN LUTHER

para wakil rakyat ini sebenarnya sudah mulai terendus saat tahun 2018. Berdasarkan audit Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun 2017. Diketahui terdapat potensi kerugian negara (KN) senilai Rp 1,05 miliar.

► Baca **KEJATI...Hal 7**



**TEMUAN
BPK RI**

**RESES ANGGOTA DPRD
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2017
POTENSI KERUGIAN
NEGARA
1,05 MILIAR**

INDIKASI

Terjadi pengelembungan jumlah **PESERTA RESES**. Biaya sewa yang tidak sesuai dengan **KONDISI SEBENARNYA**.

KRONOLOGI

Reses anggota DPRD ini dilakukan selama tiga kali dalam setahun.

Pada **3-7 APRIL, 21-25 AGUSTUS, DAN 2-6 OKTOBER**.

Peserta dalam SPJ men-
capai **500 ORANG** di
sejumlah titik reses. Real-
nya tidak demikian. Biaya
sewa tempat meja/kursi dan
sound system yang lainnya
tidak sesuai dengan kondisi
sebenarnya.



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SELASA, 03 SEPTEMBER 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERISAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejati Lidik Reses Dewan

Sambungan dari halaman 1

Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Marthin Luther, SH, MH mengatakan untuk perkara yang masih dalam proses penyelidikan (lidik) pihaknya belum bisa mengungkapkannya ke publik. Menurutnya, perkara yang sudah bisa dipublikasikan adalah perkara yang sudah naik ke tingkat penyidikan. "Kalau masih lidik belum boleh, kalau sudah penyidikan bisa diekspose," kata Marthin saat dikonfirmasi kabar pengusutan SPJ fiktif reses di Setwan Provinsi tersebut.

Dari penelusuran tim Investigasi Harian Rakyat Bengkulu menemukan ada indikasi potensi kerugian negara 1,05 miliar dari kegiatan reses yang dilakukan di Sekretariat DPRD. Kegiatan reses anggota DPRD ini dilakukan selama tiga kali dalam setahun. Awalnya pada 3-7 April 2017 kemudian 21-25 Agustus 2017 dan 2-6 Oktober.

Kegiatan reses anggota DPRD ini dilakukan selama tiga kali dalam setahun. Awalnya pada 3 sampai dengan 7 April 2017 kegiatan tersebut dinaungi dengan SK DPRD Nomor 13/KPTS/DPRD-1/2017 21 Maret 2017. Kemudian 21 sampai 25 Agustus 2017 dengan SK/KPTS/DPRD-1/2017 16 Agustus 2017 dan terakhir 2 sampai dengan 6 Oktober dengan Nomor 27/KPTS/PIMP/DPRD-1/2017 26 September 2017.

Ada sebanyak 556 bukti pembayaran transport peserta reses. Sebanyak 555 bukti menunjukkan jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan reses setiap anggota DPRD sejumlah 500 orang per periode. Hanya satu bukti yang menunjukkan jumlah peserta yang

kurang dari 500 orang yakni sebanyak 483 orang. Dari 556 bukti tersebut, sebanyak 526 bukti menunjukkan bahwa jumlah peserta dari setiap titik tujuan reses adalah 100 orang dan 30 bukti yang menunjukkan jumlah peserta yang bervariasi antara 150 sampai dengan 483.

Selain biaya transportasi peserta, di setiap lokasi reses terdapat biaya lain yang dikeluarkan. Yaitu biaya sewa tempat, sewa kursi dan sewa soundsystem. Dari total 527 bukti sewa tempat, sejumlah 524 bukti menunjukkan bahwa biaya sewa dibebankan ke desa dan tiga bukti ke pihak bukan desa. Dari total 525 bukti sewa meja kursi sebanyak 522 bukti dibebankan ke desa dan 3 bukti ke pihak bukan desa. Dari total 516 bukti sewa soundsystem, sejumlah 513 dibebankan ke desa dan sisanya sebanyak 3 bukti ke pihak bukan desa.

Selanjutnya pemeriksa melakukan konfirmasi di 289 titik tujuan reses yang terdapat dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj). "Berdasarkan konfirmasi tersebut terdapat indikasi penggelembungan jumlah peserta reses dan biaya sewa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," bunyi hasil LHP BPK.

Atas hal tersebut pemeriksa BPK meminta keterangan kepada pendamping reses sebagai pihak yang membuat SPj. Pendamping reses yang membuat SPj reses mengakui memang jumlah peserta reses tidak mencapai jumlah total 500 orang seperti dalam SPj. "Pendamping menjelaskan bahwa penambahan jumlah peserta kegiatan sehingga mencapai 500 orang adalah karena digunakan untuk membayar

keperluan lainnya di luar dana reses," kata sumber RB.

Seperti biaya sumbangan ke warga, pemberian ke petugas keamanan dan panitia acara. Pendamping juga menjelaskan pelaksanaan reses di dua sampai dengan lima titik tujuan reses yang digabung di satu tempat. Tetapi dalam SPj disebutkan bahwa pelaksanaan di masing-masing titik tujuan reses. Selain itu terdapat biaya sewa tempat meja/kursi dan soundsystem yang nilainya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. "Dengan demikian, atas dasar kondisi tersebut di atas, terdapat indikasi realisasi biaya kegiatan reses yang tidak sesuai dengan kondisi atas pembayaran uang transport peserta dan biaya sewa tempat, sewa kursi dan sewa soundsystem sebesar Rp 1,052 miliar yang terindikasi merugikan keuangan daerah," bunyi dokumen LHP BPK yang diperoleh RB.

Sementara itu plt Sekwan Provinsi Bengkulu Syaiful, SH ketika dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui dana Reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2017 tengah diusut Kejati Bengkulu. Menurutnya, sampai saat ini belum ada pemanggilan dari pihak kejati. Namun jika dipanggil untuk dimintai keterangan, Syaiful menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik dan akan memberikan keterangan apa adanya.

"Saya belum tahu, belum ada pemanggilan juga. Yah kita jelaskan saja nanti apa adanya. Saya kira tidak ada itu (dugaan SPj fiktif), semuanya sudah sesuai ketentuan dan aturan," tukas Syaiful. (zie/key)